

REKOMENDASI KEBIJAKAN UNTUK MEMAJUKAN SOLUSI BERBASIS ALAM PADA UNFCCC SB 60

Sesi ke-60 Badan Pelaksanaan (SBI 60)

Sesi ke-60 Badan Penasihat Ilmiah dan Teknologi (SBSTA 60)

3 – 13 Juni 2024, Bonn, Germany

Pada COP 28, negara-negara mencapai kesepakatan untuk mempercepat aksi transformatif dan pendanaan untuk mengatasi dampak perubahan iklim yang semakin parah. [Konsensus UAE](#) mengirimkan sinyal kuat kepada komunitas internasional bahwa dunia harus memulai transisi dari bahan bakar fosil, menghentikan deforestasi dan degradasi hutan hingga tahun 2030, mempercepat aksi berbasis ekosistem laut dalam menghadapi perubahan iklim, menggiatkan tindakan yang berfokus pada perubahan iklim dan keanekaragaman hayati, serta memastikan partisipasi inklusif masyarakat adat, komunitas lokal, perempuan, dan pemuda untuk mencapai pembangunan rendah karbon yang berkelanjutan dan penghapusan angka kemiskinan. **Pada SB 60, negara-negara harus membangun kesepakatan untuk menerapkan Konsensus UAE dan mempercepat aksi pada COP 29 yang diperlukan untuk menekan pemanasan global menjadi 1,5 derajat Celsius. Hal ini memerlukan upaya transformasional yang mendesak dan memanfaatkan potensi penuh solusi berbasis alam (NbS)¹ untuk mengurangi, beradaptasi, dan mengatasi dampak perubahan iklim.**

Untuk mencapai tingkat kecepatan dan skala yang dibutuhkan, negara-negara harus membangun kesepakatan politik dan mencari titik temu untuk memajukan hal-hal yang sedang berlangsung dan yang baru disepakati pada COP 28. Beberapa agenda penting untuk mempercepat solusi berbasis alam (NbS) meliputi implementasi mekanisme Pasal 6, tujuan pendanaan iklim baru, dan operasionalisasi lebih lanjut dari tujuan global tentang adaptasi (*Global Goal on Adaptation-GGA*). Demikian pula, Dialog Global Stocktake pertama, program UAE Just Transition, dan upaya kemitraan melalui Troika Kepresidenan COP untuk mengembangkan Peta Jalan Menuju Misi 1,5, merupakan langkah-langkah krusial untuk mendukung pencapaian NDC 2025. Negara-negara harus terlibat aktif dalam mengembangkan jalur nasional untuk meningkatkan ambisi iklim melalui solusi berbasis alam (NbS). Ini mencakup konservasi dan restorasi ekosistem karbon biru, serta memanfaatkan sinergi antara keanekaragaman hayati dan tindakan iklim melalui penyelarasan NDC dan *National Biodiversity Strategies and Action Plans* (NBSAPs). Diskusi di Bonn harus didukung oleh kebutuhan untuk mengubah praktik *business as usual*. Langkah ini meliputi menghentikan penggunaan bahan bakar fosil, dan mengalihkan insentif menuju ekonomi positif terhadap alam. Ini akan memberikan keluaran yang berarti bagi alam, keanekaragaman hayati, manusia, dan iklim.

Dalam ringkasan ini, Conservation International mengusulkan rekomendasi kebijakan secara terperinci untuk memajukan isu-isu kritis terkait solusi berbasis alam (NbS) dan aksi iklim yang inklusif dan berbasis hak dalam enam topik kunci pada SB 60:

- Mekanisme Kerja Sama di bawah Persetujuan Paris (Pasal 6)
- Tujuan Target Kolektif Baru tentang Pembiayaan Iklim
- Program Kerja UAE-Belem tentang Tujuan Global Adaptasi (GGA)
- Platform Komunitas Lokal dan Masyarakat Adat
- Nexus Iklim-Laut (Keterkaitan antara Iklim dan Laut)
- Program *Just Transition* UAE

¹ Berdasarkan [Resolusi UNEP/EA.5/Res. 5](#), solusi berbasis alam didefinisikan sebagai "tindakan untuk melindungi, melestarikan, memulihkan, menggunakan secara berkelanjutan, dan mengelola ekosistem daratan, air tawar, pesisir, dan laut alami atau yang dimodifikasi yang mengatasi tantangan sosial, ekonomi, dan lingkungan secara efektif dan adaptif, sambil sekaligus memberikan kesejahteraan manusia, layanan ekosistem, ketahanan, dan manfaat keanekaragaman hayati."

Ringkasan Rekomendasi

Untuk meningkatkan efisiensi pencapaian tujuan iklim dan pembiayaan melalui mekanisme kerja sama.

- Negosiasi harus berfokus pada isu-isu utama yang terkait dengan operasionalisasi Pasal 6. Program kerja mengenai penghindaran emisi (di bawah Pasal 6.2 dan 6.4) dan peningkatan konservasi (di bawah Pasal 6.4) harus mempertahankan cakupan yang sesuai dengan mandatnya dan tidak mengurangi peran solusi berbasis alam (NbS).
- Untuk mendorong tindakan mitigasi yang ambisius, semua pendekatan dalam Pasal 6 seharusnya mempercepat solusi berbasis alam (NbS) dengan menjaga integritas lingkungan dan sosial yang ketat serta melibatkan sebanyak mungkin negara dan pemangku kepentingan. Untuk mencapai hal ini, Para Pihak seharusnya mendukung pengurangan dan penghapusan emisi berbasis alam tanpa menetapkan syarat-syarat yang mungkin tidak tepat dan mengurangi penggunaannya dalam mekanisme Pasal 6.4.
- Melibatkan masyarakat adat dan komunitas lokal dalam diskusi tentang hubungan antara operasionalisasi Pasal 6 dan Platform Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal.

Memastikan bahwa tujuan Target Kolektif Baru tentang pembiayaan iklim (*New Collective Quantified Goal-NCQG*) menetapkan tujuan yang ambisius yang mencakup kebutuhan pembiayaan untuk solusi berbasis alam (NbS).

- Menerapkan pendekatan multilayer sesuai dengan Kerangka Kerja Keanekaragaman Hayati Global Kunming–Montreal yang terdiri dari target kuantitatif untuk mobilisasi atau penyediaan pembiayaan iklim dan penghapusan subsidi yang merugikan, serta elemen kualitatif untuk mobilisasi sumber daya domestik, memanfaatkan pembiayaan swasta, dan mempromosikan penggunaan pembiayaan gabungan dan instrumen-instrumen yang bersifat inovatif.
- Mempertimbangkan untuk penetapan tujuan indikatif yang terkait dengan setiap sektor dan/atau jalur mitigasi. Sebagai contoh, negara-negara seharusnya berusaha untuk mengalokasikan 30% dari pembiayaan mereka untuk NbS, karena NbS harus memberikan 30% dari potensi mitigasi untuk mencapai tujuan 1.5 derajat Celsius.
- Mengembangkan tujuan kualitatif sebagai indikator kesuksesan implementasi NCQG, seperti standar untuk kualitas tinggi, akses langsung yang ditingkatkan, pengiriman yang seimbang, efisiensi biaya, maksimalisasi manfaat sosial dan ekologis, pengurangan beban atas utang, dan mengatasi kesenjangan pengetahuan dan kapasitas.

Mengintegrasikan alam dan masyarakat yang rentan terhadap perubahan iklim ke dalam pengukuran dan indikator dalam kerangka kerja Global tentang Adaptasi (GGA).

- Target 9d dari Tujuan Global tentang Adaptasi seharusnya bertujuan untuk secara efektif melestarikan dan mengelola 30% dari ekosistem daratan, air tawar, pegunungan, laut, dan pesisir untuk mendukung adaptasi terhadap perubahan iklim. Target ini harus memberikan perhatian khusus kepada ekosistem yang paling rentan terhadap perubahan iklim (misalnya pegunungan, wilayah pesisir, daerah kering, lahan basah) dan yang sangat penting untuk memberikan manfaat adaptasi baik bagi manusia maupun spesies yang bergantung pada mereka.
- Solusi berbasis alam (NbS) untuk adaptasi harus secara eksplisit diintegrasikan ke dalam semua target dan indikator tematik serta aspek lain dari Tujuan Global tentang Adaptasi, karena solusi tersebut dapat memberikan manfaat adaptasi yang relevan bagi target-target tersebut

Ringkasan Rekomendasi

- Penguatan terhadap metrik, indikator, dan elemen potensial yang terukur dari target untuk Kerangka Kerja Tujuan Global tentang Adaptasi, harus mempertimbangkan pengetahuan ekologi tradisional dari Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal selain dari pengetahuan ilmiah, dan harus mencakup pendekatan adaptasi berbasis ekosistem yang dipimpin oleh masyarakat setempat.

Penguatan fungsi Platform Komunitas Lokal dan Masyarakat Adat (*Local Communities and Indigenous Peoples Platform-LCIPP*) untuk memastikan partisipasi inklusif dan efektif dalam proses kebijakan iklim serta pembagian manfaat.

- Menerapkan model kolaboratif LCIPP antara Pihak dan masyarakat adat, dan menerapkan [rekomendasi](#) LCIPP mengenai keterlibatan dan masukan dari masyarakat adat dan komunitas lokal di seluruh proses UNFCCC.
- Memastikan operasionalisasi penuh fungsi Platform Komunitas Lokal dan Masyarakat Adat (LCIPP) melalui implementasi rencana kerja tiga-tahun kedua dan memfasilitasi ruang bagi perwakilan mereka untuk berpartisipasi dan memberikan kontribusi pada poin agenda negosiasi yang relevan, termasuk program kerja Pasal 6.8, Tujuan Global tentang Adaptasi (GGA), dan *Loss and Damage* (L&D).
- Meningkatkan keterlibatan yang signifikan dari pemerintah dalam kegiatan LCIPP, terutama dalam kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi komunitas lokal dan masyarakat adat dalam perencanaan kebijakan iklim nasional dan pembiayaan.

Meneruskan pengembangan dan pengembangan aksi yang memperhatikan keterkaitan antara iklim dan laut (Nexus iklim-laut).

- Meningkatkan dan mengarahkan distribusi aliran dana untuk solusi berbasis alam (NbS) di wilayah pesisir dalam negosiasi dan proses terkait pendanaan iklim, termasuk tujuan Target Kolektif Baru (NCQG) tentang *Standing Committee on Finance Forum 2024*.
- Mengintegrasikan indikator untuk solusi berbasis alam (NbS) wilayah pesisir dalam indikator Tujuan Global tentang Adaptasi (GGA).
- Meningkatkan kapasitas dan pemahaman tentang berbagai metode untuk solusi berbasis alam (NbS) wilayah pesisir, termasuk pelestarian dan restorasi habitat karbon biru, dapat diintegrasikan ke dalam NDC yang terbaru dan dalam Rencana Adaptasi Nasional (*National Adaptation Plans-NAPs*).
- Pada Dialog GST, akan dibahas praktik terbaik dan tanggapan tentang bagaimana menggunakan hasil GST untuk dimasukkan ke dalam NDC berikutnya, termasuk bagaimana cara negara-negara dapat memanfaatkan solusi berbasis alam (NbS) di wilayah pesisir untuk tindakan mitigasi dan adaptasi.

Meningkatkan dukungan terhadap peran solusi berbasis alam (NbS) dan insentif yang efektif bagi ekonomi yang berorientasi pada alam dalam mencapai jalur transisi yang adil.

- Peranan solusi berbasis alam (NbS) dan pekerjaan yang terkait dengan alam dalam mencapai peralihan yang berkeadilan, termasuk insentif ekonomi yang diperlukan untuk memajukannya, harus menjadi fokus setidaknya satu dialog dan/atau diskusi meja bundar, serta diintegrasikan secara menyeluruh dalam program kerja peralihan tersebut
- Membuat panduan praktis tentang cara mempercepat jalur transisi yang positif terhadap alam untuk diadopsi dalam NDC dan berbagai mekanisme Persetujuan Paris, terutama untuk mencegah dan mengurangi dampak perubahan iklim pada kelompok yang paling rentan, termasuk di daerah pedesaan, dengan tujuan meningkatkan ketahanan mereka dan meningkatkan mata pencaharian.

Mekanisme Kerja Sama di Bawah Persetujuan Paris

Agenda item 13 SBSTA

Dokumen yang relevan: [Keputusan 17/CMA.5 tentang Program Kerja Pasal 6.8](#)

Pasal 6 dari Persetujuan Paris menetapkan kerangka kerja yang luas untuk kerja sama sukarela antara Para Pihak dalam melaksanakan aksi iklim. Pasal ini menetapkan tiga mekanisme di mana Para Pihak dapat berinteraksi: 1) pendekatan kerja sama bilateral atau regional melalui hasil mitigasi yang ditransfer secara internasional (*Internationally Transferred Mitigation Outcomes-ITMO*); 2) mekanisme UNFCCC yang dikelola secara sentral untuk berkontribusi pada mitigasi dan mendukung pembangunan berkelanjutan; dan 3) pendekatan non-pasar².

Mendorong transfer pengurangan dan penyerapan emisi berkualitas tinggi yang dihasilkan di semua sektor, termasuk sektor penggunaan lahan, dapat mendorong aliran dana yang diperlukan untuk aksi iklim, serta mengelola sumber daya dan penyerapan karbon secara efisien dari segi biaya, dan menciptakan peluang untuk peningkatan ambisi secara keseluruhan. Selain itu, pendanaan untuk penurunan dan penghilangan karbon berbasis alam sangat penting untuk tindakan mitigasi iklim jangka pendek yang diperlukan untuk membatasi pemanasan global menjadi 1,5°C. Pendanaan ini memberikan manfaat tambahan dalam mitigasi dengan mengurangi kerugian keanekaragaman hayati, meningkatkan ketahanan air, dan memberikan mata pencaharian bagi masyarakat yang bergantung pada hutan. Jenis penurunan dan/atau penghilangan emisi seperti ini juga telah diuji coba dan dipantau secara luas, serta dapat memberikan manfaat berkelanjutan untuk mitigasi iklim.

Sejak aturan utama Pasal 6 ditetapkan pada COP 26, Para Pihak telah bekerja untuk menentukan hal-hal detail yang masih belum terselesaikan dalam pendekatan kerja sama ini. Para Pihak secara khusus meminta Badan Pengawas Pasal 6.4 (*A6.4 Supervisory Body-SB*) untuk menyiapkan rekomendasi mengenai kegiatan yang melibatkan pengurangan dan panduan metodologinya. A6.4 SB diberi tugas untuk meningkatkannya, dengan tujuan diserahkan kepada CMA untuk persetujuan pada COP29. Saat pekerjaan teknis ini selesai, Para Pihak harus memastikan bahwa **solusi berbasis alam (NbS) diprioritaskan dalam pendekatan pasar dan non-pasar untuk mengamankan dukungan pembiayaan ke solusi iklim penting ini**; untuk tujuan ini, Conservation International merekomendasikan bahwa:

- **Pihak-pihak berfokus pada hal-hal utama yang menjadi prioritas untuk sepenuhnya menjalankan Artikel 6 dan memastikan program kerja tentang penghindaran emisi dalam Artikel 6.2 dan Artikel 6.4, serta peningkatan konservasi dalam Artikel 6.4, sesuai dengan mandat yang telah ditetapkan.** Dua program kerja terkait "penghindaran emisi" dan satu program tentang "peningkatan konservasi" telah dibuat pada COP 26 dan tindak lanjutnya akan dilakukan menjelang COP 28. Istilah-istilah ini belum secara resmi didefinisikan oleh UNFCCC atau IPCC dan menimbulkan kebingungan di antara Para Pihak karena dapat diinterpretasikan secara berbeda-beda. Seluruh penyerapan dan penghindaran emisi dari semua sektor sudah memenuhi syarat di bawah Pasal 6 selama persyaratan dalam panduan Pasal 6.2 dan Pasal 6.4 terpenuhi. Oleh karena itu, semua kegiatan harus diperlakukan sebagai penyerapan atau penghindaran emisi, dan tidak ada ruang untuk mendiskusikan kegiatan baru yang tidak terdefinisi atau jenis mitigasi baru. **Program kerja terkait penghindaran emisi dan peningkatan konservasi harus dibatasi pada lingkup ini, dipastikan agar tidak ada diskusi tentang kegiatan pengurangan emisi atau peningkatan penyerapan, atau membuka lagi hal-hal yang sudah disepakati pada COP 26.**
- **Para pihak seharusnya hanya menerima rekomendasi tentang penyerapan dan panduan metodologi yang tidak memihak pada sektor tertentu dan menghindari menetapkan persyaratan apa pun yang secara tidak wajar atau tidak proporsional mengurangi pengurangan dan/atau penyerapan berbasis alam dalam mekanisme Pasal 6.4, sebagai berikut:**
 - **Risiko pembalikan:** Alat atau panduan yang disetujui untuk menilai risiko pembalikan pada pengurangan dan penyerapan Pasal 6.4 haruslah dirancang tanpa membedakan penyerapan

² Perjanjian Paris, Pasal 6, Ayat 2, 4, dan 8, secara berurutan

berbasis alam atau memberlakukan beban yang tidak wajar pada kredit dari penyerapan tersebut. Semua kegiatan memiliki risiko pembalikan dan tidak seharusnya dikategorikan berdasarkan tingkat risiko pembalikan tertentu. Desain alat penilaian risiko harus memperhitungkan hal ini dan tidak boleh digunakan sebagai alat pengecualian. Area perlindungan yang dirancang dengan baik dan efektif, bersama dengan langkah-langkah pemantauan, pelaporan, dan tindakan perbaikan yang diadopsi oleh peserta kegiatan, merupakan alat yang telah diuji untuk mengatasi dan mengimbangi risiko pembalikan. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Catatan Teknis Conservation International: Memahami risiko pembalikan dalam penyerapan berbasis alam](#).

- **Periode dan persyaratan pemantauan setelah pemberian kredit:** Pemantauan setelah pemberian kredit haruslah dapat dilakukan dengan layak dan realistis untuk mendorong terjadinya kegiatan penyerapan, yang konsisten di semua jenis proyek, termasuk prosedur untuk mengalihkan tanggung jawab pemantauan. Tanpa pendapatan dari kredit karbon untuk mendukung kegiatan ini, persyaratan tersebut akan menjadi tidak realistis dan dapat mengurangi insentif untuk menggunakan mekanisme ini. Hal ini bertentangan dengan tujuan yang diharapkan oleh Para Pihak saat Persetujuan Paris disepakati.
- **Pengamanan:** Kerangka yang lebih ketat untuk memastikan integritas lingkungan dan pembagian manfaat dengan komunitas lokal yang layak adalah hal yang mendasar untuk memastikan risiko sosial dan lingkungan diidentifikasi dan dicegah, dampak sosial dan lingkungan positif terjamin, serta hak dan partisipasi masyarakat adat dan komunitas lokal dihormati dan dipenuhi. Pengembangan *Sustainable Development Tool* dan Mekanisme Pengaduan dalam ketentuan Pasal 6.4 disambut baik dan seharusnya disetujui oleh Para Pihak.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat kontribusi Conservation International untuk A6.4 SB: [Dokumen dari Conservation International terkait Penghindaran, Metodologi, Proses Banding dan Penyelesaian Sengketa, serta Instrumen Pembangunan Berkelanjutan](#)

- **Di bawah program kerja Pasal 6.8 tentang kerangka kerja untuk pendekatan non-pasar, Para Pihak seharusnya terus bekerja untuk menyiapkan jalur kerja sama non-pasar melalui pendekatan mitigasi dan adaptasi berbasis alam.** Kegiatan kelompok dan sesi-sesi diskusi harus memberikan lebih banyak perhatian antara lain terhadap inisiatif yang dipimpin oleh masyarakat adat dan komunitas lokal, contoh-contoh pendekatan non-pasar yang memperkuat koneksi antara iklim dan keanekaragaman hayati, kesiapan untuk REDD+, pendekatan untuk menciptakan kondisi-kondisi yang memungkinkan dan membuka akses pembiayaan berkelanjutan jangka panjang, kesepakatan konservasi dan pendekatan landscape/lautan terpadu, serta berkontribusi pada peningkatan skala inisiatif-inisiatif tersebut. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Dokumen dari Conservation International terkait Pasal 6.8](#).
- Para Pihak dan pelaku non-negara **seharusnya secara proaktif melibatkan perwakilan masyarakat adat dan komunitas lokal dalam diskusi mengenai keterkaitan antara operasionalisasi Pasal 6 dan kerja-kerja Platform Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal**, termasuk pembentukan mekanisme peninjauan dan penyelesaian sengketa yang independen, adil, dan dapat diakses dalam kerangka Pasal 6.4, inklusi yang adil terhadap Masyarakat Adat dan komunitas lokal dalam mekanisme pembagian manfaat atas implementasi Pasal 6, memajukan hak tenurial lahan, dan identifikasi kriteria yang relevan untuk mendefinisikan, memantau, dan melaporkan pendekatan non-pasar dalam kerangka Pasal 6.8 yang inklusif terhadap solusi berbasis alam (NbS) yang dipimpin oleh masyarakat adat dan komunitas lokal.

Seiring mekanisme kerja sama dalam Pasal 6 mulai berjalan sepenuhnya dan negara-negara menerapkannya, kebutuhan untuk mempercepat dukungan teknis dan pembiayaan kepada negara-negara berkembang untuk pembangunan kapasitas, kesiapan, dan penciptaan kondisi yang memungkinkan untuk implementasi yang efektif semakin meningkat. Para Pihak seharusnya mempertimbangkan pemberian dukungan ini dan memastikan partisipasi yang adil dalam mekanisme kerja sama Pasal 6, serta memberikan peluang untuk meningkatkan ambisi selama implementasi NDC.

Tujuan Target Kolektif Baru tentang Pembiayaan Iklim

Dialog Pakar Teknis ke-10

Pertemuan Kedua dalam Program Kerja Ad Hoc

Dokumen yang relevan: [Keputusan 8/CMA.5 tentang NCQG](#); [Laporan tahun 2023 tentang program kerja ad hoc](#); [Rencana Kerja untuk tahun 2024](#); dan [Dokumen Masukan Co-Chair untuk Pertemuan Pertama di bawah Program Kerja Ad Hoc](#).

Pada tahun 2010, negara-negara maju berkomitmen untuk mencapai tujuan secara bersama-sama dalam memobilisasi dana sebesar \$100 miliar USD per tahun pada tahun 2020 untuk mendanai aksi iklim di negara-negara berkembang. Hal ini akhirnya tercapai pada tahun 2023; namun, dalam proses tersebut, pembahasan seputar pembiayaan iklim berkembang, karena banyak yang menyadari bahwa target jumlah dana awal tidak memadai karena berbagai alasan, dengan negara berkembang membutuhkan setidaknya \$6 triliun USD agar memenuhi setengah dari Kontribusi yang Ditentukan Secara Nasional (NDC) mereka pada tahun 2030³. **Oleh karena itu, negara-negara sepakat untuk menetapkan Sasaran Target Kolektif Baru (*New Collective Quantified Goal-NCQG*) tentang pembiayaan iklim di COP 29.** Sebuah program kerja ad hoc dimulai tahun 2022-2024 untuk memutuskan rincian tujuan, termasuk jumlah, kualitas, cakupan, akses, sumber, dan ketentuan transparansi. Dialog Teknis Ahli (*Technical Expert Dialogue-TED*) telah memungkinkan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk membahas berbagai isu, dan negara-negara memutuskan untuk mulai mengembangkan struktur rancangan NCQG dalam COP 28 untuk negosiasi politik pada tahun 2024.

Meskipun pendanaan untuk Solusi Berbasis Alam (NbS) belum menjadi tema utama selama proses ini, hasil NCQG dapat menjadi bagian penting dalam mengatasi kesenjangan pendanaan alam yang signifikan dan meningkatkan akses pembiayaan berkualitas tinggi untuk area-area penting dan masyarakat yang membutuhkan. Menurut UNEP: **"Aliran pembiayaan tahunan ke NbS perlu lebih dari dua kali lipat pada tahun 2025 (dari US\$200 miliar menjadi US\$436 miliar) dan hampir tiga kali lipat menjadi US\$542 miliar pada tahun 2030 untuk mencapai target perubahan iklim, keanekaragaman hayati, dan degradasi lahan."**⁴ Namun saat ini, NbS kurang pendanaan jika dibandingkan dengan potensinya untuk berkontribusi sepertiga dari kebutuhan mitigasi global: sektor pertanian, kehutanan, dan penggunaan lahan lainnya (*Agriculture, Forestry, and Other Land Use-AFOLU*) hanya menerima 3% dari pembiayaan mitigasi dan pembiayaan ganda mitigasi/adaptasi, serta 11% dari pembiayaan adaptasi pada tahun 2021-2022.⁵ Selain itu, banyak dari masyarakat adat dan komunitas lokal yang menerapkan solusi berbasis alam (NbS) tetapi tidak dapat secara langsung mengakses pembiayaan ini, sementara itu masih terdapat insentif merugikan senilai sekitar \$7 triliun dollar per tahun yang terus mempercepat kerusakan alam⁶. **Saat NCQG masuk ke tahap negosiasi, Para Pihak harus memastikan untuk memperhitungkan kebutuhan pembiayaan iklim untuk kelestarian alam, termasuk untuk habitat pesisir.** Conservation International mendorong Para Pihak untuk mempertimbangkan rekomendasi berikut:

- **Memastikan prinsip-prinsip NCQG, tujuannya, dan implementasinya sejalan dengan pemenuhan Pasal 2.1(c)** dari Persetujuan Paris. Keputusan NCQG dan proses yang dihasilkan dapat dijadikan sebagai contoh penerapan Pasal 2.1(c) dalam praktik.
- Menerapkan **pendekatan multilayer sesuai dengan Kerangka Keanekaragaman Hayati Global (GBF) Kunming-Montreal** yang terdiri dari **target kuantitatif untuk mobilisasi atau penyediaan pembiayaan iklim dan penghapusan subsidi yang merugikan, serta elemen-elemen kualitatif untuk mobilisasi sumber daya domestik, memanfaatkan pembiayaan swasta, dan mempromosikan penggunaan pembiayaan campuran dan instrumen-instrumen inovatif.** Kesesuaian dengan GBF sangat penting untuk memastikan sinergi bagi aksi yang berkaitan dengan iklim-keanekaragaman hayati, serta menyederhanakan proses implementasi dan pelaporan. Dalam pendekatan ini:

³ UNCTAD: [A climate finance goal that works for developing countries](#)

⁴ UNEP: [State of Finance for Nature 2023](#)

⁵ Climate Policy Initiative: [Global Landscape of Climate Finance 2023](#)

⁶ UNEP: [State of Finance for Nature 2023](#)

- Menetapkan **target tahunan yang ambisius untuk mobilisasi atau penyediaan pembiayaan iklim dari semua sumber, dengan tujuan untuk mitigasi, adaptasi, dan kerugian serta kerusakan.** Jumlahnya harus didasarkan pada ilmu pengetahuan dan data yang tersedia mengenai kebutuhan pembiayaan iklim global, memastikan agar kebutuhan pembiayaan untuk NbS dan adaptasi berbasis ekosistem (*Ecosystem-based Adaptation-EbA*) serta kebutuhan dan prioritas negara-negara berkembang tercakup sepenuhnya.
- Dalam target tahunan untuk mobilisasi atau penyediaan pembiayaan iklim, perlu mempertimbangkan penentuan **tujuan turunan sehubungan dengan setiap sumber pembiayaan,** termasuk namun tidak terbatas pada mobilisasi sumber daya domestik, Pendanaan internasional/Bantuan Pembangunan Luar Negeri (ODA), kontribusi sektor swasta dan filantropi, instrumen keuangan inovatif, dan reformasi subsidi. Jumlahnya harus didasarkan pada seberapa banyak yang saat ini dihabiskan, berapa banyak yang dibutuhkan, dan situasi nasional.
- Dalam tujuan mitigasi, pertimbangkan untuk menetapkan tujuan turunan indikatif terkait setiap sektor dan/atau jalur mitigasi. Sebagai contoh, negara-negara seharusnya berusaha untuk **mengalokasikan 30% dari pembiayaan mereka untuk solusi berbasis alam (NbS), karena solusi berbasis alam (NbS) harus berkontribusi 30% dari potensi mitigasi untuk mencapai tujuan 1.5 derajat Celsius.**
- **Menetapkan target ambisius untuk menghentikan subsidi yang merugikan dan/atau insentif yang mendorong kegiatan beremisi tinggi dan pembangunan yang rentan terhadap perubahan iklim,** termasuk yang terkait dengan bahan bakar fosil dan aktivitas merugikan di sektor pertanian, kehutanan, dan penggunaan lahan (AFOLU) yang menyebabkan kerugian alam, dan lain-lain. Perlu mempertimbangkan untuk menetapkan target berdasarkan waktu untuk mengidentifikasi dan menganalisis subsidi yang paling merugikan, serta kapan dan seberapa besar reformasi yang harus dilakukan. Hal ini harus sejalan dengan Target 18 dari GBF jika memungkinkan.⁷
- **Menetapkan tujuan yang jelas untuk tahun 2030, dengan tujuan indikatif untuk tahun 2035, dan tujuan jangka panjang untuk tahun 2050.** Tujuan tersebut kemudian harus diperbarui dengan format yang serupa setiap lima tahun, sesuai dengan siklus NDC.
- **Menyelaraskan jangka waktu, proses pelaporan, dan siklus peninjauan tujuan dengan kerangka yang telah disepakati di bawah Persetujuan Paris** jika memungkinkan, seperti penggunaan kerangka waktu yang seragam untuk NDC, meningkatkan transparansi, dan proses Global Stocktake. Melalui pendekatan ini, integrasi NCQG akan memastikan bahwa tujuan tersebut secara teratur dapat mencerminkan informasi baru, sekaligus mengurangi tugas pelaporan yang berlebihan dan menghindari perpanjangan proses yang membebani negara-negara yang sudah menghadapi keterbatasan kapasitas. Sistem tambahan dapat dikembangkan sesuai kebutuhan untuk memastikan semua aspek NCQG dapat dipantau secara efektif.
- Mengembangkan **tujuan-tujuan kualitatif turunan sebagai indikator keberhasilan dalam penyampaian NCQG,** yang harus dilaporkan bersama dengan tujuan-tujuan lainnya. Tujuan turunan ini mencakup:
 - Menetapkan **standar yang jelas dan berkualitas tinggi untuk keperluan pendanaan iklim yang baru,** dengan penyaluran pendanaan yang lebih besar, prediktabilitas jangka panjang, akses yang lebih luas, responsivitas gender, serta perlindungan.
 - Peningkatan kapasitas bagi **masyarakat adat, komunitas lokal, perempuan, dan kelompok rentan terhadap iklim untuk secara langsung mengakses pembiayaan iklim.**

⁷ **Target 18 GBF:** Pada tahun 2025, identifikasi, hapuskan, atau reformasi insentif, termasuk subsidi, yang merugikan bagi keanekaragaman hayati, secara proporsional, adil, efektif, dan berkeadilan, sambil secara signifikan dan bertahap menguranginya setidaknya sebesar 500 miliar dolar Amerika per tahun pada tahun 2030, dimulai dengan insentif paling merugikan, dan meningkatkan insentif positif untuk konservasi dan penggunaan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan.

- o Memastikan **pendistribusian dana yang seimbang antara seluruh pilar tematik dan sektor**, serta memastikan mengurangi kesenjangan pendanaan yang tidak proporsional untuk adaptasi, sektor AFOLU, NbS, dan bidang lainnya.
- o **Memaksimalkan manfaat dari pembiayaan iklim dan mendorong penyediaan dana untuk solusi iklim yang memiliki manfaat untuk iklim, sosial, dan ekologis yang beragam**, termasuk NbS dan EbA.
- o Mewajibkan mobilisasi sumber daya melalui **instrumen pembiayaan yang tidak memperberat beban utang atau justru mengurangi tekanan hutang negara-negara berkembang**, termasuk dalam bentuk hibah, pinjaman konsesional, investasi modal, pertukaran hutang dengan pembiayaan yang diperuntukkan untuk melindungi alam (*debt-for-nature swaps*), dan pembayaran berbasis kinerja.
- o **Meningkatkan kapasitas di dalam negeri agar dapat secara efektif menyalurkan dana** ke proyek, termasuk dukungan untuk kesiapan dan pengembangan proyek.
- o **Mengatasi kesenjangan pengetahuan** termasuk dalam mengkuantifikasi kebutuhan, prioritas, dan mobilisasi pembiayaan iklim berdasarkan sektor, subsektor, wilayah geografis, dan kerangka waktu.

Program Kerja UAE-Belem tentang Tujuan Global Adaptasi

Agenda SBI 10a

Agenda SBSTA 5a

Dokumen yang relevan: [Keputusan 2/CMA.5 pada GGA](#)

Pada COP 28, negara-negara sepakat mengenai Kerangka Tujuan Global Adaptasi (GGA) yang memberikan arah strategis melalui tujuh target tematik dan target empat dimensi yang menentukan bagaimana negara-negara akan mencapai tujuan adaptasi yang luas yang ditetapkan dalam Persetujuan Paris. Namun, negara-negara menyadari masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk menjalankan kerangka tersebut. Oleh karena itu, mereka meluncurkan program kerja dua tahun UAE-Belem tentang GGA untuk lebih mengembangkan indikator dan metrik guna mengukur dan menilai kemajuan menuju kerangka GGA. Keputusan tentang hal ini diharapkan akan diadopsi di COP 30.

Program kerja dua tahun UAE-Belem tentang GGA diharapkan menghasilkan serangkaian metrik, indikator, dan elemen terkuantifikasi yang kuat untuk kerangka tersebut. Negara-negara dapat menggunakan ini untuk melaporkan pencapaian adaptasi dan memastikan penilaian bersama terhadap kemajuan menuju target-targetnya. Singkatnya, "apa yang diukur, itu yang dikelola", dan prinsip ini penting untuk memastikan negara-negara memprioritaskan ketahanan ekosistem dan menggunakan pendekatan adaptasi berbasis ekosistem yang sesuai. Metrik dan indikator yang berkaitan dengan ekosistem dan pendekatan adaptasi berbasis ekosistem perlu diidentifikasi dengan jelas dalam target tematik 9d, dan juga harus terhubung dengan semua target tematik lainnya (9 a-g) serta target-dimensional seputar siklus adaptasi (10 a-d). Conservation International menyampaikan rekomendasi untuk program kerja UAE-Belem pada SB60 sebagai berikut:

- Sebagai bagian dari modalitas, pihak-pihak sebaiknya mempertimbangkan pembentukan **kelompok kerja teknis atau komite ahli untuk setiap target tematik**. Masukan dan partisipasi dari Pihak dan Pemangku Kepentingan non-Pihak, termasuk semua organisasi pengamat yang diakreditasi oleh UNFCCC, perlu menjadi pelengkap kontribusi teknis yang mendalam, seperti melalui pendaftaran terbuka untuk berkontribusi sebelum pertemuan.
- Metrik dan indikator sebaiknya didasarkan pada kumpulan data secara global dan kerangka kerja yang sudah ada untuk meminimalkan beban pelaporan dan melengkapinya dengan perspektif adaptasi bila diperlukan. Secara khusus, metrik dan indikator perlu bersinergi dengan Konvensi Rio lainnya dan perjanjian lingkungan multilateral yang relevan, seperti SDGs dan Kerangka Kerja Sendai untuk

Pengurangan Risiko Bencana dan Ramsar.

- Target 9d seharusnya bertujuan untuk secara **efektif melestarikan dan mengelola 30% dari ekosistem daratan, air tawar, pegunungan, laut, dan wilayah pesisir, dengan perhatian khusus pada ekosistem yang berisiko tinggi terdampak perubahan iklim dan yang penting untuk memberikan manfaat adaptasi bagi manusia dan alam.**
- **Solusi adaptasi berbasis alam sebaiknya diintegrasikan ke dalam semua sasaran tematik dan dimensi lainnya** karena dapat memberikan manfaat adaptasi yang relevan untuk sasaran-sasaran tersebut. Dalam hal ini, indikator untuk sasaran-sasaran dimensi harus mencakup aspek sasaran tematik yang berkaitan dengan alam.
- Metrik, indikator, dan elemen yang dapat diukur dari sasaran-sasaran tersebut harus dikembangkan agar dapat memprioritaskan dan mengukur hasil di **antara kelompok yang paling rentan terhadap perubahan iklim**, termasuk masyarakat lokal, perempuan, dan pemuda. Selain itu, penting juga untuk mempertimbangkan **pengetahuan tradisional mereka sebagai tambahan dari pengetahuan ilmiah**, serta mendorong negara-negara untuk mengadopsi pendekatan adaptasi berbasis ekosistem yang dipimpin secara lokal dalam perencanaan adaptasi nasional.
- Program kerja harus mempertimbangkan bagaimana sasaran tematik dan dimensional dari Kerangka GGA diintegrasikan ke dalam panduan Rencana Adaptasi Nasional baru yang akan dikembangkan oleh Kelompok Ahli Negara Berkembang Terkurang (*Least Developed Countries Expert Group-LEG*).

[Untuk informasi lebih lanjut, lihat dokumen tentang program kerja UAE-Belem dari Conservation International](#)

Platform Komunitas Lokal dan Masyarakat Adat

Pertemuan ke-11 Kelompok Kerja Fasilitatif
Agenda SBSTA 7

Dokumen yang relevan: [Pernyataan Visi dan Strategi; Laporan Kelompok Kerja Fasilitatif dari Platform Komunitas Lokal dan Masyarakat Adat](#)

Persetujuan Paris dengan tegas mengakui hak-hak masyarakat adat (*Indigenous People-IPs*) dan komunitas lokal (*Local Community-LC*) dalam konteks aksi iklim. Melalui Platform Komunitas Lokal dan Masyarakat Adat (*Local Communities and Indigenous Peoples Platform-LCIPP*) dan Kelompok Kerja Fasilitatif (*Facilitative Working Group-FWG*)-nya, Para Pihak dan Masyarakat Adat bekerja sama untuk bertukar ilmu pengetahuan dan membangun kapasitas guna memperkuat partisipasi inklusif untuk Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal, serta mengakui kontribusi mereka dalam mengatasi perubahan iklim. LCIPP saat ini sedang melaksanakan rencana kerja kedua, yang berlangsung selama tiga tahun hingga 2024. Pada SB 60, Masyarakat Adat akan memimpin lokakarya pelatihan tahunan untuk membangun kapasitas Para Pihak, badan-badan yang terbentuk, dan pemangku kepentingan lainnya untuk berinteraksi dengan komunitas lokal dan masyarakat adat. Selain berpartisipasi dalam kegiatan ini, **pemangku kepentingan Pihak dan non-Pihak perlu menargetkan hal-hal berikut pada SB 60:**

- **Menerapkan model kolaboratif LCIPP dan FWG** antara Para Pihak dan Masyarakat Adat untuk meningkatkan kerja sama internasional dalam bidang di mana partisipasi pemangku kepentingan non-Pihak penting untuk meningkatkan ambisi iklim dan mencapai tujuan Persetujuan Paris. Untuk memperkuat model ini lebih lanjut, Para Pihak dan pemangku kepentingan non-Pihak juga seharusnya **secara konsisten menerapkan rekomendasi FWG tentang keterlibatan dan masukan dari Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal dalam seluruh proses UNFCCC.**
- Memastikan pelaksanaan penuh **fungsi LCIPP** melalui implementasi rencana kerja tiga tahun untuk tahun kedua dan memastikan adanya ruang bagi perwakilan FWG untuk berpartisipasi dan berkontribusi pada agenda yang relevan, termasuk program kerja tentang Pasal 6.8, Tujuan Global tentang Adaptasi (GGA), dan Jalur Transisi yang Adil (*Just Transition Pathways*).

- Memasukkan rekomendasi dari laporan mengenai hasil FWG ke dalam rencana kerja LCIPP untuk periode 2025–2027, dengan memperhatikan kemajuan terkait representasi masyarakat lokal.
- **Memperbanyak keterlibatan pemerintah dalam kegiatan LCIPP**, terutama dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat adat dan komunitas lokal dalam perencanaan kebijakan iklim nasional. Para pihak seharusnya berkolaborasi dengan masyarakat adat dan komunitas lokal untuk memperkuat hubungan untuk kegiatan perubahan iklim lokal-nasional dan regional-global dari masyarakat adat dan komunitas lokal.
- **Menyampaikan hasil dan pelajaran yang diperoleh dari pertukaran regional LCIPP untuk mendukung agenda penting UNFCCC** serta menyoroti keterkaitannya dengan konvensi PBB lainnya, seperti Konvensi Keanekaragaman Hayati.
- Memperkuat partisipasi **inklusif dan efektif dari masyarakat adat dan komunitas lokal** dalam pengembangan dan implementasi NDC, NAPs, mekanisme pembagian manfaat, dan kebijakan iklim, melalui pertukaran ilmu pengetahuan, memperkuat kapasitas partisipasi, kebijakan iklim, dan tindakan. Para pihak dapat mencontoh praktik terbaik dari LCIPP dengan mengumpulkan masyarakat adat dan komunitas lokal untuk berkolaborasi di tingkat nasional.

Neksus Laut-Ikim

Dokumen yang relevan: [Pesan kepada pihak-pihak – Ocean Climate dialog 2024](#)

Hasil dari COP 28 menegaskan peran penting solusi berbasis alam (NbS) di wilayah pesisir dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang ambisius, seperti yang terlihat dalam keputusan terkait Global Stocktake (GST) dan Tujuan Global tentang Adaptasi (GGA). Hasil GST pada COP 28 menegaskan **pentingnya tindakan yang melibatkan ekosistem laut untuk mitigasi dan adaptasi, dengan menekankan pentingnya pelestarian dan restorasi ekosistem pesisir dan mendorong penguatan inisiatif tersebut**. Demikian pula, hasil GGA menekankan perlunya segera mengadopsi adaptasi berbasis ekosistem dan solusi berbasis alam (NbS), terutama melalui **pengelolaan, restorasi, konservasi, dan perlindungan ekosistem pesisir**. Ada banyak kesempatan untuk mengembangkan area kerja ini. Oleh karena itu, **pada SB 60, Conservation International mendorong agar Para Pihak:**

- **Mendorong peningkatan aliran pembiayaan dan memperluas sumber pendanaan untuk solusi berbasis alam (NbS) di wilayah pesisir dan laut.** Dalam proses negosiasi terkait pembiayaan yang sedang berlangsung, termasuk peninjauan **Target Kolektif Baru tentang Pembiayaan Iklim**, Komite Tetap untuk Pembiayaan, dan Dana Kerugian dan Kerusakan (*Standing Committee on Finance and the Loss & Damage Fund*), negara-negara diharapkan memastikan bahwa struktur dan mekanisme yang sedang dikembangkan mendukung pembiayaan yang kuat untuk solusi berbasis alam (NbS) di wilayah pesisir dan kelautan. Selama pelaksanaan *Standing Committee Forum 2024*, yang akan menekankan aksi perubahan dan ketahanan iklim melalui pendanaan yang responsif terhadap gender untuk sistem ketahanan pangan dan pertanian yang berkelanjutan, Para Pihak diharapkan untuk mempertimbangkan peran penting habitat pesisir, seperti hutan bakau dan padang lamun, dalam membangun sistem pangan akuatik yang tangguh.
- **Melakukan integrasi indikator untuk solusi berbasis alam (NbS) di pesisir dalam indikator-indikator dari Tujuan Global Adaptasi (GGA).** Pihak-pihak seharusnya mendorong inklusi eksplisit dari solusi berbasis alam (NbS) pesisir dan laut sebagai elemen lintas sektor dari sasaran tematik dan dimensional. Hal ini sejalan dengan kerangka kerja GGA untuk meningkatkan ketahanan pesisir dan meningkatkan mata pencaharian. Sebagai contoh, target yang potensial seperti, "kerusakan pada infrastruktur dan pemukiman yang berisiko tinggi akibat perubahan iklim berkurang (% penurunan dibandingkan dengan dasar)" dapat diukur dengan indikator berbasis NbS (misalnya, kerusakan yang berhasil dihindari).

- **Meningkatkan ambisi untuk solusi berbasis alam (NbS) di pesisir:** Pihak-pihak seharusnya memanfaatkan sesi SB 60 bulan Juni, termasuk diskusi dalam tema ketahanan pesisir dalam dialog perubahan iklim dan laut, program kerja untuk jalur transisi yang adil (*Just Transition*), dan dialog GST, untuk membangun kapasitas dan pemahaman tentang cara integrasi solusi berbasis alam di pesisir, termasuk konservasi dan restorasi habitat karbon biru, dalam NDC baru dan yang diperbarui serta Rencana Adaptasi Nasional (NAPs). Dokumen pedoman tambahan untuk mendukung pembaruan NDC termasuk [Panduan untuk Menyertakan Infrastruktur Hijau-Abu di Pesisir dalam NDC](#), dan [Karbon Biru dan Kontribusi yang Ditentukan Secara Nasional: Edisi Kedua](#).

Program Kerja Transisi UAE

Agenda SBI 7

Agenda SBSTA 9

Dokumen yang relevan: [Keputusan 3/CMA.5 mengenai program kerja Transisi Adil; Topik Diskusi - Dialog Pertama pada tahun 2024](#).

Pada COP 28, negara-negara memulai program kerja Transisi UAE, yang akan berlangsung hingga 2026 dan difokuskan pada tujuh elemen tematik untuk mendukung negara-negara dalam transisi yang adil dan merata menuju pencapaian tujuan Persetujuan Paris. Ini mencakup menciptakan lapangan kerja yang layak dan berkualitas serta mengarahkan aliran pembiayaan ke arah pembangunan rendah emisi dan ketahanan iklim.

Solusi berbasis alam (NbS) dan pekerjaan yang terkait dengan alam akan menjadi sangat penting dalam menciptakan jalur transisi yang adil. Program kerja ini akan menjadi wadah yang signifikan untuk meningkatkan kesadaran tentang solusi-solusi tersebut dan mendukung insentif ekonomi yang diperlukan untuk implementasi NDC, sambil juga mengurangi subsidi yang merugikan yang masih mempercepat kerugian alam. Perubahan iklim juga secara tidak merata memengaruhi masyarakat pedesaan yang hidup dalam kemiskinan, perempuan, dan populasi yang terpinggirkan, menjadikan mereka semakin rentan dan program kerja harus juag mendukung negara-negara dalam mengembangkan solusi iklim yang mendorong ketahanan dan kesejahteraan masyarakat.

Pertemuan pertama pada tahun 2024 akan berfokus pada jalur transisi yang adil untuk mencapai tujuan Persetujuan Paris melalui NDC, NAP, dan LT-LED. Dengan Para Pihak mempertimbangkan cara melanjutkan diskusi awal ini dan lebih memprioritaskan topik serta hasil yang diinginkan dari program kerja, Conservation International merekomendasikan:

- **Peran solusi berbasis alam (NbS) dan pekerjaan di sektor alam dalam mencapai jalur transisi yang adil,** misalnya peningkatan insentif ekonomi positif yang diperlukan untuk mengembangkan solusi tersebut secara merata, serta perlunya mengatasi subsidi negatif yang merugikan alam. Oleh karena itu, perlu difokuskan pada setidaknya satu dialog dan/atau diskusi dalam program kerja tersebut.
- **Peran solusi berbasis alam (NbS) dalam mengurangi dampak perubahan iklim,** meningkatkan ketahanan, dan meningkatkan taraf hidup masyarakat yang paling rentan, termasuk di daerah pedesaan, **harus menjadi topik lintas sektor antar semua dialog.**
- Para pihak diharapkan memusatkan diskusi pada insentif ekonomi yang diperlukan untuk memastikan transisi yang adil bagi seluruh masyarakat, dengan menginvestasikan upaya dalam mendorong jenis perubahan transformasional yang diperlukan untuk menciptakan ekonomi yang memiliki nilai positif alam. Dalam konteks ini, penting untuk memberikan penekanan yang eksplisit pada perlunya reformasi subsidi sebagai salah satu jalur kunci yang dapat memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi semua, terutama bagi mereka yang paling rentan.
- Hasil dari pertemuan seharusnya bertujuan untuk mengembangkan panduan praktis guna meningkatkan aksi di tingkat nasional dan kerja sama internasional dalam mencapai jalur transisi yang adil. Selain itu, masukan tentang tindakan yang diperlukan dalam proses terkait di bawah Persetujuan Paris, *Constituted Bodies*, dan Mekanisme Keuangan UNFCCC juga perlu disertakan.